



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana

Q

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja

2

Walikota terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Renja-PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD Tahun 2024 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024;
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024;
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

2

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Agustus 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (2), Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta pada pasal 33 ayat (3), bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, didalamnya memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2024 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2024, berpedoman pada RPJMD dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, Renstra Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Tahun 2020-2024, Renstra Biro Organisasi serta Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
BLITAR TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

1. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (2), Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta pada pasal 33 ayat (3), bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, didalamnya memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2024 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2024, berpedoman pada RPJMD dan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, Renstra Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Tahun 2020-2024, Renstra Biro Organisasi serta Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;

3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana untuk tahun 2024;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
 32. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74);
 33. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 57);
 34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
 35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar bagian maupun bagian dengan perangkat daerah lainnya.

Tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2024;
- Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS atau Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024; serta
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2024 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024, dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 serta prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Tahun 2024 dan rencana tindak lanjut LKj IP Perangkat Daerah Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Sub Bab ini disajikan Review atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2022) dan perkiraan pencapaian realisasi Rencana Kerja pada tahun berjalan (2023) sesuai dengan APBD Tahun 2023. Berkenaan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah didasarkan pada realisasi atas Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah. Adapun Program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2 Tahun Rencana) dan 2023 (n-1 tahun rencana) relatif sama, namun dalam sub kegiatan atau aktivitasnya dimungkinkan ada perbedaan. Program yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	BAGIAN PEMERINTAHAN									
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	100 %	-	42, % 86	47, % 62	111,11%	57,14 %	57,14 %	57,14
2.13.04.0 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	21 kelurahan	-	17 kelu raha n	21 kelur ahan	123,53	18 kelu raha n	18 kelur ahan	85,71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.04.0 2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 kelurahan	-	21 kelurahan	21 kelurahan	100,00	21 kelurahan	21 kelurahan	100,00
4.01	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	-	66,67 %	66,67 %	100,00	83,33 %	83,33 %	83,33
4.01.02.0 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.0 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	-	6 Rumusan Kebijakan akan	6 Rumusan Kebijakan akan	100,00	6 Rumusan Kebijakan akan	6 Rumusan Kebijakan akan	100,00
4.01.02.0 2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	-	-	-	-	25 Dokumen	25 Dokumen	100,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.02.0 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 rumusan kebijakan	-	4 rumusan kebijakan akan	4 rumusan kebijakan akan	100,00	4 rumusan kebijakan akan	4 rumusan kebijakan akan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02.0 2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
4.01.02.0 2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.03.0 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	-	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	100,00	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	100,00
4.01.03.0 2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
4.01.03.0 2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100,00
4.01.03.0 2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
4.01.03.0 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	90 %	-	80 %	0 %	0,00	82,5 %	82,5 %	91,67
4.01.03.0 2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	90 %	-	35 %	31,94 %	91,25	50 %	50 %	55,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.02.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	-	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	100,00	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	100,00
4.01.03.02.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
4.01.03.02.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	-	-	-	-	16 Laporan	16 Laporan	100,00
4.01.03.02.02	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	BAIK Nilai (84,00)	-	BAIK (81,50) Nilai	BAIK (82,84) Nilai	101,64	BAIK (82) Nilai	BAIK (82) Nilai	97,62
		Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	9/9 Nilai	-	4/9 Nilai	4/9 Nilai	100,00	5/9 Nilai	5/9 Nilai	55,56
4.01.03.02.02.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	-	80 Dokumen	73 Dokumen	91,25	80 Dokumen	80 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.0 2.02.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
4.01.03.0 2.02.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	-	-	-	-	300 Orang	300 Orang	100,00
	BAGIAN ORGANISASI									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	100 %	-	55,17 %	76,67 %	138,96	55,17 %	55,17 %	55,17
4.01.03.0 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	30 OPD	-	20 OPD	23 OPD	115,00	20 OPD	20 OPD	66,67
4.01.01.0 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.0 2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
4.01.01.0 2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	48,28 %	-	20, % 69	24, % 14	116,67	27,59 %	27,59 %	57,15
4.01.01.0 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	30 OPD	-	20 OPD	23 OPD	115,00	22 OPD	22 OPD	73,33
4.01.01.0 2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	-	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	100,00
4.01.01.0 2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGA T BAIK (90,00)	-	BAIK (86,00)	SANGAT BAIK	106,62	BAIK (87,00)	BAIK (87,00)	96,67
4.01.01.0 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.0 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00
4.01.01.0 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
4.01.01.0 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.0 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	-	-	-	-	6 Paket	6 Paket	100,00
4.01.01.0 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	84 Orang	-	84 Orang	84 Orang	100,00	84 Orang	84 Orang	100,00
	BAGIAN UMUM									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100 %	-	100 %	100 %	100,00 -	100 %	100 %	100,00
4.01.01.0 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.0 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
4.01.01.0 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.0 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.0 2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
4.01.01.0 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.0 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	2 Unit	-	1 Jenis	1 Jenis	100,00	2 Unit	2 Unit	100,00
4.01.01.0 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100,00
4.01.01.0 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.0 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100,00	1 Jenis	1 Jenis	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.0 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	-	-	-	-	48 Laporan	48 Laporan	100,00
4.01.01.0 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	-	6 jenis	6 jenis	100,00	6 Laporan	6 Laporan	100,00
4.01.01.0 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	-	-	-	-	13 Laporan	13 Laporan	100,00
4.01.01.0 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	-	88, 35 %	88, 35 %	88,35	100 %	100 %	100,00
4.01.01.0 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	-	2 Unit	1 Unit	50,00	2 Unit	2 Unit	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.0 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	-	-	-	-	65 Unit	65 Unit	100,00
4.01.01.0 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	-	-	-	-	40 Unit	40 Unit	100,00
4.01.01.0 2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100,00
4.01.01.0 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100,00	4 Unit	4 Unit	100,00
4.01.01.0 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	-	-	-	-	10 Unit a	10 Unit	100,00
4.01.01.0 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.0 2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	-	-	-	-	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	100,00
4.01.01.0 2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	-	23 Jenis	23 Jenis	100,00	23 Paket	23 Paket	100,00
4.01.01.0 2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	-	2 Fasilitas	2 Fasilitas	100,00	2 Orang	2 Orang	100,00
4.01.01.0 2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bulan	-	2 Jenis	2 Jenis	100,00	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	100,00
4.01.01.0 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.0 2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	-	4 Fasilitasi	3 Fasilitasi	75,00	4 Paket	4 Paket	100,00
4.01.01.0 2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	-	4 Fasilitasi	3 Fasilitasi	75,00	4 Paket	4 Paket	100,00
4.01.01.0 2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	-	12 Fasilitasi	10 Fasilitasi	83,33	12 Paket	12 Paket	100,00
4.01.01.0 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	-	80 %	80 %	100,00	80 %	80 %	100,00
4.01.01.0 2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	-	-	-	-	33 Laporan	33 Laporan	100,00
4.01.01.0 2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	-	400 Naskah	609 naskah	152,25	400 Laporan	400 Laporan	100,00
4.01.01.0 2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	-	-	-	-	3055 Laporan	3055 Laporan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.0 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.0 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Lapo ran	1 Lapo ran	100,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGA T BAIK (90,00)	-	BAIK (86,00)	SANGAT BAIK (91,69)	106,62	BAIK (87,00)	BAIK (87,00)	96,67
4.01.01.0 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
4.01.01.0 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Pake t	1 Paket	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.0 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	-	-	-	-	7 Paket	7 Paket	100,00
4.01.01.0 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	-	-	-	-	3 Paket	3 Paket	100,00
4.01.01.0 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	-	-	-	-	170 Paket	170 Paket	100,00
4.01.01.0 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100,00
4.01.01.0 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	-	-	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00
4.01.01.0 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	-	-	-	-	130 Laporan	130 Laporan	100,00
4.01.01.0 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	-	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	-	-	-	-	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	100,00
4.01.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	-	4 Dokumen	4 dokumen	100,00	4 Laporan	4 Laporan	100,00

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

Jika disandingkan dengan pencapaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 maka dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 2.1.2
Ketercapaian Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (%)
1	URUSAN PENUNJANG/ SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5	114,76%	8	107,56%	106,42%	25	103,30%	104,12%
				<i>Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</i>		<i>Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan</i>				
		Administrasi Tata Pemerintahan		100,00%	4					
		Penataan Administrasi Pemerintahan				100,00%		3		
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				100,00%		5		
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				100,00%		2		
		Fasilitasi Kerjasama Daerah		100,00%	1					
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				100,00%		2		
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		130,23%	1					
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				117,96%		3		
		Fasilitasi Bantuan Hukum				100,00%		2		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				115,00%		2		
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100,00%	2					
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100,00%		4		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				100,00%		1		

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (%)
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				100,00%		1		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3	97,08%	6	75,41%	128,74%	11	82,36%	91,56%
				<i>Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</i>		<i>Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan</i>				
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		50,00%	2					
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				100,00%		1		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0,00%		1		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				100,00%		1		
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		0,00%	1					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				50,00%		2		
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100,00%	1					
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				100,00%		1		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				100,00%		2		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		101,64%	2					
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				91,25%		1		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				100,00%		1		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100,00%		1		

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (%)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4	115,56%	14	100,24%	116,53%	59	97,41%	102,91%
				<i>Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</i>		<i>Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan</i>				
		Penataan Organisasi		115,00%	1					
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				100,00%		2		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				145,11%		4		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				120,02%		6		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00%	1					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100,00%		1		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100,00%		1		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00%	1					
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100,00%		2		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00%	1					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100,00%		1		
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100,00%	1					
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				100,00%		1		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00%	1					
		Pengadaan Mebel				100,00%		1		

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (%)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100,00%		1		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00%	1					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100,00%		1		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100,00%		1		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33,33%		1		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100,00%		1		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88,35%	1					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50,00%		1		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				105,21%		2		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100,00%		2		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90,91%		1		
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100,00%	1					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100,00%		1		
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100,00%		1		

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (%)
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100,00%		1		
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100,00%		1		
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100,00%	1					
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				75,00%		1		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				75,00%		1		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				83,33%		1		
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100,00%	1					
		Fasilitasi Keprotokolan				158,34%		2		
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				152,25%		1		
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan				125,90%		3		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00%	1					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%		1		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00%	1					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				96,00%		1		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50,00%		2		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				95,65%		1		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				118,05%		3		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				96,88%		2		

NO	Urusan/ OPD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Sub Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (%)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100,00%		1		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				91,54%		1		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00%	1					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100,00%		1		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100,00%		1		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	111,11%	1	123,53%	89,95%	1	100,00%	123,53%
				<i>Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kegiatan</i>		<i>Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan</i>				
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		123,53%	1					
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				100,00%		1		

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2022

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari total 4 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2022, yang tercapai sesuai target atau melebihi target ada 3 (tiga) Program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Administrasi Pemerintahan Desa. Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan yang rata-rata capaiannya yaitu 97,08%, oleh karenanya perlu dilaksanakan perbaikan-perbaikan terkait pelaksanaannya, antara lain :
 - a. Permasalahan Pelaksanaan Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sesungguhnya alokasi untuk Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID bukan untuk DBHCHT
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan sesungguhnya alokasi untuk Koordinasi penguatan sektor ekonomi yang bersifat urusan pilihan (meliputi, urusan pertanian, perikanan dan sejenisnya) bukan untuk DBHCHT
 - Indikator program yang belum mencapai 100% yakni adalah Persentase pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement*. Hal ini disebabkan paket pengadaan yang semula direncanakan melalui tender, setelah dilakukan kaji ulang dan review dilaksanakan melalui katalog lokal sehingga mengurangi jumlah paket tender
 - Perencanaan pembangunan fisik dilakukan pada tahun berjalan sehingga paket pekerjaan mundur menunggu perencanaan selesai
 - Dokumen perencanaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada saat pengajuan tender, setelah dilakukan review oleh Pokja yang dibantu tenaga ahli ternyata memerlukan banyak penyesuaian. Hal ini disebabkan penyusunan dokumen perencanaan kurang teliti dan kurang konsisten
 - Terdapat kebijakan atau program baru dari Pemerintah pusat yaitu penggunaan produk dalam negeri dan katalog lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun berjalan sehingga daerah harus menyesuaikan dalam bentuk kebijakan
 - Jadwal rencana pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh masing-masing PD belum dapat dilaksanakan secara optimal dan Sinkronisasi antara perencanaan penganggaran dengan kegiatan/paket pekerjaan perlu ditingkatkan agar realisasi anggaran dapat terserap lebih optimal
 - Mayoritas PD belum memenuhi target penyerapan baik realisasi anggaran maupun realisasi fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan
 - Beberapa paket pengadaan barjas dengan nominal sama dengan atau diatas 200 juta tidak dilakukan dengan metode kompetitif tetapi beralih transaksional menggunakan katalog lokal karena untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan Inpres Nomor 2 tahun 2022
 - Masih banyak penyedia dan UKM serta Koperasi terutama yang berasal dari Kota Blitar belum mendaftarkan diri pada LPSE dan Katalog Lokal sehingga produknya belum tayang dan belum dapat melaksanakan transaksi pada katalog lokal

Melihat berbagai permasalahan-permasalahan diatas, maka perlu dilakukan langkah perbaikan yakni :

1. Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD
2. Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

3. Seluruh pengadaan barjas yang ada di PD pejabat pengadaannya berasal dari personel UKPBJ
 4. Melaksanakan sosialisasi dan penekanan kepada PD untuk mengikuti kebijakan Pemerintah serta dengan menerbitkan Surat Edaran terkait percepatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah
 5. Mewajibkan PD untuk mengentry paket pekerjaan pada aplikasi SIRUP maksimal bulan Februari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP
 6. Rutin dilaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD per triwulan serta Tim TEPRA rutin melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan untuk menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya
 7. Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya
 8. Menunjuk tenaga ahli untuk melakukan pendampingan pada PD saat review / kaji ulang dokumen pengajuan tender
 9. Pada bulan November 2022 dilaksanakan Bimtek dan Desk pendampingan perhitungan TKDN kepada PD/Unit Kerja untuk paket-paket pengadaan barang/jasa tahun 2023
 10. Dilaksanakan bimtek katalog lokal kepada penyedia/UMK dan Koperasi se Kota Blitar
 11. Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik
2. Dari total 22 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2022 terdapat 3 kegiatan yang capaiannya dibawah target yakni :
1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Disebabkan penyesuaian yang terlambat terhadap kebijakan pengelolaan DBHCHT sesuai bidang yang telah ditetapkan. Sehingga perlu segera dilakukan pemetaan sekaligus perubahan tata Kelola dan alokasi DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Dan pada Tahun 2021 – 2022 telah dilakukan akselerasi penyesuaian regulasi sekaligus penetapan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola DBHCHT.
 2. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Disebabkan oleh hal yang sama dengan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian karena keduanya merupakan kegiatan untuk mewadahi aktifitas DBHCHT
 3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Disebabkan pelaksanaan kegiatan ini sangat tergantung dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan harga yang berlaku yakni antara lain guna pembayaran pajak kendaraan jabatan, pembayaran pajak kendaraan dinas operasional, serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang secara jumlah unit bisa berfluktuatif.
Untuk itu kedepan perlu dilakukan langkah perbaikan yakni membuat perencanaan anggaran dan kinerja lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

3. Dari total 58 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah rata-rata mampu memenuhi target yang ditetapkan meskipun ada beberapa yang tidak terpenuhi karena :

- Tidak cukupnya waktu atas pembahasan 3 Raperda yang belum tercapai
- Satgas Operasi Bersama pemberantasan Cukai Ilegal baru terbentuk dasar hukumnya akhir Desember 2021 dan diterbitkan Januari 2022 sehingga sedikit terlambat kinerjanya selama tahun 2022
- Lambatnya pengajuan pengadaan barang/jasa untuk paket-paket senilai atau lebih besar dari 200 juta kepada UKPBJ sehingga pengadaannya tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan pada RUP
- Realisasi kinerja dan penyerapan anggaran didasarkan atas kebutuhan organisasi dan harga yang berlaku
- Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional yang terbayarkan sesuai dengan jatuh temponya
- Terdapat penyesuaian jenis fasilitasi kebutuhan pimpinan daerah
- Terdapat penyesuaian rincian atau spesifikasi barang guna dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan selain mempunyai indikator kinerja utama dalam mencapai kinerja organisasi maka berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun pencapaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat dilihat secara rinci dalam tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Blitar

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1,13%	1,15%	1,17%	-	-	-	-	0,80%	0,92%	1,17%	Ketidacapaian target tahun 2022 – 2023 disebabkan oleh terbitnya kebijakan berupa Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka mendukung Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barjas pemerintah yang menginstruksikan peningkatan belanja PBJ melalui katalog lokal
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	98,80	98,85	98,90	-	-	-	-	87,39	88,41	98,90	Ketidacapaian target tahun 2022 – 2023 disebabkan kurang tepatnya perencanaan anggaran dengan realisasi kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
12	Nilai SAKIP Setda	-	-	-	B	A (86)	A (87)	A (88)	A (85, 29)	A (87)	A (88)	Ketidaktercapaian target disebabkan oleh: a. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), realistis namun belum cukup menantang b. Sekretariat Daerah telah menyusun SOP pengumpulan data kinerja namun atas SOP tersebut belum dapat ditelusuri sumber data dengan valid c. Pengumpulan data kinerja pada Sekretariat Daerah masih dilakukan dengan cara manual (belum menggunakan teknologi informasi)

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
												d. Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan e. Implementasi SAKIP belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal dalam efektifitas dan efisiensi kinerja f. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian pada seluruh pegawai
13	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	-	-	-	94%	-	-	-	-	-	-	Merupakan indikator sasaran strategis Renstra 2016-2021 sehingga tidak dilakukan pengukuran di periode Renstra 2022-2026
14	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	-	-	-	BAIK	-	-	-	-	-	-	
15	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	-	-	-	BAIK	-	-	-	-	-	-	
16	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	-	-	-	BAIK	-	-	-	-	-	-	
17	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	-	-	-	BAIK	-	-	-	-	-	-	
18	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	-	-	-	BAIK	-	-	-	-	-	-	

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
19	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan sangat mendukung terhadap terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan merupakan wujud peduli pemerintah di tengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat sehingga pencapaiannya selalu diupayakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
20	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	-	-	-	-	55.17 %	65.52 %	75.86%	55.17%	76,67%	100%	Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan monev pelaksanaan area reformasi birokrasi.

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
21	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dalam pencapaian kinerja ini sangat didukung oleh faktor (1) koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait urusan kewilayahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat (2) adanya kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat
22	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pencapaian kinerja yang sudah memenuhi target sangat didukung oleh tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta responsif terhadap kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
23	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	-	-	-	-	20.69 %	27.59 %	34.48%	20.69%	100%	100%	Pencapaian kinerja yang melebihi dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa 30 OPD di Kota Blitar telah menindaklanjuti hasil SKM dalam bentuk rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana aksi tersebut merupakan upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan dari 3 (tiga) komponen terendah dari hasil SKM OPD berdasarkan PermenPAN 14 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target IKK			Target Renstra Sekretariat Daerah				Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisa
		2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
24	Nilai rata - rata SKM Setda	-	-	-	-	BAIK (86,00)	BAIK (87,00)	SANGAT BAIK (88,32)	BAIK (86,00)	SANGAT BAIK (91,69)	SANGAT BAIK (92,00)	Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh: 1) sarpras yang memadai dan prosedur yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan 2) perilaku pelayanan yang ramah, sopan dan cekatan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan yang relatif cepat 3) kompetensi pelaksana sesuai standar

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

Dari indikator kinerja tersebut diatas, berdasarkan penetapan kinerja utama perangkat daerah sesuai RPJMD Kota Blitar 2021-2026 ada 3 (tiga) indikator yang harus dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)
2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, Sekretariat Daerah mendukung *Misi ke 1* “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan“, *Tujuan ke 1* “Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis“, *Sasaran ke 1* “Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama” dan *Misi ke 5* “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”, *Tujuan* “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi “, *Sasaran ke 1* “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah“. Dimana jika target kinerja pada Sekretariat Daerah tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar yaitu Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Status EKPPD serta Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah untuk mencapai target tersebut.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan
 1. Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan keterangan pertanggungjawaban dan fasilitasi Administrasi KDH dan WKDH
 2. Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama dengan Luar Negeri
 3. Belum optimalnya evaluasi perkembangan kelurahan
 4. Belum optimalnya pembinaan pemberdayaan masyarakat (RT keren, BBGRM, TTG)
 5. Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan
 6. Belum optimalnya pelaksanaan Toponimi (pemberian nama rupabumi)
 7. Belum optimalnya Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan adanya perubahan Indikator pada IKK LPPD yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan
 8. Belum tersosialisasikannya dengan optimal kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
 9. Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Sosial Kota Blitar
 10. Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial secara optimal
 11. Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar
 12. Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat secara optimal
 13. Belum optimalnya pelaksanaan deregulasi peraturan perundang-undangan
 14. Belum optimalnya Pemenuhan Standar JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
- b. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
 1. Belum tersusunnya peta kebijakan perekonomian Kota Blitar
 2. Belum adanya Tim Koordinasi Investasi dan Perekonomian Daerah Kota Blitar
 3. Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD
 4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
 5. Belum optimalnya kompetensi pelaku pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah
 6. Belum tercukupinya jumlah personel PPBJ sesuai dengan rekom LKPP dan perhitungan beban kerja personel PPBJ
 7. Adanya sasaran RB Tematik yang mengamanatkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan program prioritas Presiden
- c. Isu terkait penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
 1. Belum optimalnya pengelolaan manajemen kinerja melalui sebuah aplikasi yang menyatukan seluruh proses pentahapan kinerja
 2. Dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan target kinerja setiap tahunnya telah ditetapkan, sehingga kita akan kesulitan untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan dari RB Tematik maupun General.

3. Dikeluarkannya kebijakan penyederhanaan struktur organisasi (PSO) maka memunculkan isu-isu strategis yang harus segera diambil langkah:
 - a. Perlu adanya revisi terkait aturan yang mendasari penataan kelembagaan (PP Nomor 18 Tahun 2016)
 - b. Belum optimalnya implementasi sistem kerja pasca diterbitkannya Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
 - c. Belum optimalnya penerapan SPBE sebagai sarana pendukung penerapan sistem kerja yang baru
 4. Jumlah PNS yang pensiun dari tahun ke tahun semakin bertambah, sedangkan pelaksanaan rekrutmen tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun terlebih beban kerja setiap ASN semakin bertambah yang tidak sebanding dengan besaran kesejahteraan yang diterima. Kondisi ini dapat mengakibatkan produktifitas setiap ASN akan menurun yang berakibat terhadap pelayanan publik dibawah batas yang distandarkan.
 5. Belum optimalnya kebijakan yang menumbuhkan iklim inovasi pelayanan publik disetiap perangkat daerah, sehingga terkesan tidak ada terobosan dalam melaksanakan kegiatan
- d. Isu terkait Administrasi Umum Pelayanan Publik
1. Belum berjalannya Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi umum bidang kearsipan
 2. Kurangnya manajemen penataan parkir kendaraan di kompleks kantor Walikota Blitar
 3. Kurangnya tenaga MC atau pranata acara pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat maka perlu peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kesejahteraan masyarakat, kebijakan pemerintahan, penguatan pelaksanaan otonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat
2. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan yang baik maka perlu dilakukan:
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Peta Kebijakan Daerah
 - b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan
 - d. Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD
 - e. Melaksanakan deregulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
 - f. Memenuhi Standar JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
 - g. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan
 - h. Peningkatan belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil/Usaha Kecil dan Koperasi melalui pengadaan barang/jasa Pemerintah
3. Dalam meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu adanya penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam implementasi manajemen kinerja, Reformasi Birokrasi baik Tematik

maupun General, penataan kelembagaan serta memberikan saran masukan terhadap revisi PP 18/2016, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi, penguatan SPBE, memberikan pertimbangan terkait peningkatan kesejahteraan ASN, serta penguatan pembinaan OPD penyelenggara pelayanan publik sehingga mampu menumbuhkan iklim inovasi ditingkat perangkat daerah

4. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum pelayanan publik maka perlu dilakukan:
 - a. perlu dilakukan pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah
 - b. perlu adanya perbaikan manajemen penataan parkir di lingkungan kantor Walikota Blitar
 - c. perlu adanya kebijakan penataan kepegawaian terutama pemenuhan kebutuhan serta pelatihan, pembinaan serta pendampingan tenaga prantara acara pada masing-masing Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024 telah menentukan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas infrastuktur;
2. Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid 19;
3. Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis;
4. Peningkatan derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, maka Sekretariat Daerah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kota Blitar

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				105.644.412	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				120.646.500	
I	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Blitar	Persentase kelurahan tertib administrasi	71,43 %	105.644.412	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Blitar	Persentase kelurahan tertib administrasi	71,43 %	120.646.500	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Blitar	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	19 kelurahan	105.644.412	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Blitar	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	19 kelurahan	120.646.500	
1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	105.644.412	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	120.646.500	
II	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
A	SEKRETARIAT DAERAH					SEKRETARIAT DAERAH					
I.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	1.129.479.815	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	2.399.909.758	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Blitar	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	1.023.202.431	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Blitar	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	2.399.909.758	
			Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %				Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %		
			Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %				Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %		
			Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang	100 %				Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang	100 %		

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			dilaksanakan pembinaan					dilaksanakan pembinaan			
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	297.548.226	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	252.794.200	
1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	725.654.205	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	1.915.110.558	
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	154.693.500	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	154.693.500	
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Blitar	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83.33 %	106.277.384	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83.33 %	77.311.500	
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	106.277.384	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	77.311.500	
I.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	1.137.206.052	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	660.140.200	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	1.137.206.052	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	660.140.200	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	415.586.088	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	207.338.900	
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	460.543.017	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	271.810.700	
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	261.076.947	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 Dokumen	180.990.600	
I.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	10.265.619.510	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	8.781.778.500	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	10.265.619.510	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	8.781.778.500	
			Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Rumusan Kebijakan				Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Rumusan Kebijakan		
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	10.072.278.937	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	8.563.539.500	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	85.221.296	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	114.023.300	
1.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan	2 Dokumen	108.119.277	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi	2 Dokumen	104.215.700	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
II.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	3.516.966.841	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	854.256.062	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	1.186.279.697	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Blitar	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 Rumusan Kebijakan	651.438.400	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	209.488.246	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	234.376.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 laporan	722.166.126	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	220.108.200	
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	254.625.325	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	196.954.200	
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Blitar	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	2.330.687.144	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Blitar	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	202.817.662	
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2.330.687.144	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	202.817.662	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
III.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	24.140.927.403	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	25.120.412.842	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (79-84) Nilai				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (79-84) Nilai		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	18.361.596	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	11.158.300	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	18.361.596	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.158.300	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	10.347.819.097	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	12.390.692.028	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ bulan	10.336.663.386	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ bulan	12.381.347.028	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	11.155.712	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	9.345.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	9.408.178	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	9.450.000,00	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.600.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.210.000,00	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
3.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	1.100.000						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD tidak diambil pada Renja 2024
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.708.178	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.240.000,00	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	1.677.044	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	1.060.000	
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1.677.044	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1.060.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.701.323.698	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.344.497.800	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.129.981	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.986.100	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	243.301.399	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	151.706.500	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	32.430.509	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	40.479.500	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	537.062.962	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	552.096.400	
5.5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	79.212.703	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	74.642.300	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	48.352.740	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	43.650.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	679.833.404	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	407.937.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	95.688.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	69.410.200	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan priotitas kebutuhan
6.1	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	85.688.400	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	69.410.200	
6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	3.336.101.734	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang	100 %	4.187.398.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
								urusan sesuai standar			
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	612.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	437.000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1.205.800.993	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1.029.257.000	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	83.357.369	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	30.600.000	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	2.046.331.311	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3.127.104.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.440.053.552	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Blitar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.456.487.100	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
						Pemerintahan Daerah					
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	10.201.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	455.630.100	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	349.306.437	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	503.228.000	
8.3	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	0 unit	-	
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	237.929.000	
8.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
8.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	743.802.380	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	259.700.000	
8.7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 unit	266.743.735	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
8.8	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	-	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	948.960.689	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	923.716.314	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	182.549.256	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	178.952.314	
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	148.230.833	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	138.764.000	
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	6.120.600	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	6.000.000	
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	612.060.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	600.000.000	
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Blitar	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	100 %	4.152.280.326	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Blitar	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat	100 %	3.087.322.900	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
								Daerah yang di laksanakan			
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	2.106.077.242	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.456.623.800	
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.500.249.849	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	1.334.617.200	
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	545.953.236	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	296.081.900	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	2.283.973.653	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 %	1.639.220.200	
11.1	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	2.049.960.919	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	1.421.862.900	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	117.639.360	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	63.384.000	
11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	116.373.375	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	153.973.300	
III.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (79-84) Nilai	632.186.466	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (79-84) Nilai	880.298.873	
			Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	34,48 %				Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	34,48 %		
			Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	75,86 %				Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	75,86 %		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	102.003.471	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	35.503.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	49.339.789	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	16.942.500	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	52.663.683	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	18.560.500	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	92.717.093	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	151.494.600	
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	40.400.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	69.182.000	Target menyesuaikan dengan kebutuhan

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
2.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	52.317.093	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	82.312.600	Anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan
3	Penataan Organisasi	Kota Blitar	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	24 OPD	437.465.902	Penataan Organisasi	Kota Blitar	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	24 OPD	693.301.273	
3.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	261.496.208	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	182.005.100	
3.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	410.965.902	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	248.560.940	
3.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	359.160.950	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	232.479.900	
3.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	3 Dokumen	26.500.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	3 Dokumen	18.555.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
			Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
3.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	11.700.333	
II.2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	63,33 %	1.216.179.797	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Blitar	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	63,33 %	638.969.100	
			Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %		
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	353.036.188	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	159.849.100	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	73.430.501	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	36.413.400	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	279.605.687	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	123.435.700	
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	6 nilai	863.143.609	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	6 nilai	479.120.000	
			SKM Layanan UKPBJ	82,5 nilai				SKM Layanan UKPBJ	82,5 nilai		
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	481.261.809	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	275.471.400	
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	53.128.767	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	59.892.000	
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	328.753.034	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	143.756.600	

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi, perangkat daerah juga berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Untuk tahun perencanaan 2024, Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak mendapat usulan dari Musrenbang Kecamatan maupun dari pokok – pokok pikiran DPRD.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan capaian kinerja yang diinginkan dicapai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah :

Rencana Strategis Kementerian PANRB

Visi Kementerian PANRB Tahun 2020 – 2024 yaitu :

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia *dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong-Royong”*”.

Misi Kementerian PANRB yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *digital bureaucracy*
2. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel
3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Rencana Strategis Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Visi Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yaitu :

“Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Bidang Penataan Daerah, Kelembagaan, Kepegawaian Perangkat Daerah, Produk Hukum Daerah, Evaluasi Kinerja dan Otsus/Istimewa”

Misi Ditjen Otonomi Daerah yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah serta Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah serta Kualitas Produk Hukum Daerah

Sedangkan jika dikaitkan dengan perencanaan tahunan Pemerintah Pusat maka Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan mengusung tema “*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Untuk menerjemahkan tema besar tersebut, Pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional Tahun 2024 :

1. Prioritas Nasional 1:
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Prioritas Nasional 2:
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Prioritas Nasional 3:

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas Nasional 4:
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 5. Prioritas Nasional 5:
Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 6. Prioritas Nasional 6:
Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
 7. Prioritas Nasional 7:
Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan transformasi Pelayanan Publik.

Dan guna mencapai arah kebijakan secara nasional tersebut maka sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 mengusung tema *“Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah”* dengan prioritas pada:

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur;
- 2) Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak COVID-19;
- 3) Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis;
- 4) Peningkatan derajat kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia; serta
- 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar
(Renstra Tahun 2021 – 2026)

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN	
				2023	2024
	TUJUAN:				
I	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80.00	83.70	83,85
	SASARAN:				
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%
	TUJUAN:				
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (72,06)	BB (72,20)	BB (72,25)
	SASARAN:				
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	34.48%	65.52%	75,86%
	TUJUAN:				
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3532)	Sangat Tinggi (3,3534)
	SASARAN:				
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN	
				2023	2024
		Umum yang diimplementasikan			
	TUJUAN:				
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (82,39)	BAIK (84,00)	BAIK (85,00)
	SASARAN:				
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	10.34%	27.59%	34.48%
		Nilai rata - rata SKM Setda		BAIK (87,00)	SANGAT BAIK (88,32)
	TUJUAN:				
IV	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,99)	A (87)	A (88)
	SASARAN:				
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	A (83,99)	A (87)	A (88)

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.01.00 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.01.00 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
4.01.02.2.01.00 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.04.00 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03.00 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03.00 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.03.00 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
		rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.02.00 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Mendukung Misi Walikota
4.01.02.2.02.00 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.02.2.02.00 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Mendukung Tematik RB
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Mendukung Tematik RB
4.01.03.2.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.01.00 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Mendukung Tematik RB
4.01.03.2.01.00 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Mendukung Tematik RB
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Mendukung Tematik RB
4.01.03.2.04.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Mendukung Tematik RB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
	Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/ Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.04.00 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.09.00 011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.00 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.00 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.11.00 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12.00 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12.00 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.12.00 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14.00 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14.00 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.14.00 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
		Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Mendukung Tematik RB dan SAKIP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Mendukung Tematik RB dan SAKIP
4.01.01.2.13.00 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Mendukung Tematik RB dan SAKIP
4.01.01.2.13.00 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Mendukung Tematik RB dan SAKIP
4.01.01.2.13.00 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Mendukung Tematik RB dan SAKIP
4.01.01.2.13.00 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Mendukung Tematik RB dan SAKIP
4.01.01.2.13.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Mendukung Tematik RB dan SAKIP
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	Mendukung Tematik RB
		Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.00 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.01.2.02.00 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Mendukung Tematik RB dan RB General
		SKM Layanan UKPBJ	Mendukung pencapaian Tupoksi
4.01.03.2.03.00 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Mendukung Tematik RB dan pencapaian IKK
4.01.03.2.03.00 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Mendukung Tematik RB dan pencapaian IKK
4.01.03.2.03.00 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mendukung pencapaian Tupoksi

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana kerja dan pendanaan dengan memakai kaidah dan indikator yang spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan serta fleksibel terhadap perubahan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Perumusan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Blitar sehingga program dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota Blitar.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi
3. Tahun 2024 adalah tahun Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan didukung Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi dengan tema: “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024: Memantapkan Pembangunan Jawa Timur yang adil, sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang partisipatoris, Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Pada tahun ini, arah kebijakan Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur sama-sama menekankan pada perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, Sekretariat Daerah berperan dalam melakukan perumusan kebijakan, fasilitasi implementasi kebijakan, pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap kesinambungan pelaksanaan kebijakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Blitar Melayani	Penguatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan internalisasi kinerja organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi
			Peningkatan administrasi pembangunan	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
			Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
		Penguatan Sistem Pemerintah	Peningkatan Kebijakan Internal	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penataan Organisasi

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		an Berbasis Elektronik (SPBE)		Daerah Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Kelembagaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi
			Peningkatan Penerapan Manajemen	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi
			Peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan	1. Perekonomian dan Pembangunan 2. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Administrasi Tata Pemerintahan 3. Penataan Organisasi
			Peningkatana Pelayanan Publik	1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2. Penataan Organisasi
	Blitar Keren	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
	Blitar Sehat	Konvergensi Stunting	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Setda Tahun 2022
pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Melaksanakan penjadwalan ulang kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual serta perlunya menyamakan persepsi antar lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat • Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan perekonomian	a. Pemetaan sekaligus perubahan tata Kelola dan alokasi DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT b. Pada tahun 2024 merupakan keberlanjutan pengalokasian anggaran program DBHCHT dikembalikan sesuai tujuan dari Pengendalian Inflasi Daerah dan perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan c. Melakukan percepatan restrukturisasi melalui penetapan Organ BUMD dengan penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja dan penerapan ketentuan Perda yang menjadi dasar penyelenggaraan BUMD d. Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	• Program Perekonomian dan Pembangunan • Kegiatan: 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam • Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pembangunan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	• Melaksanakan sosialisasi dan penekanan kepada PD untuk mengikuti kebijakan Pemerintah serta dengan menerbitkan Surat Edaran terkait	• Program Perekonima dan Pembangunan • Kegiatan: 1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		percepatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah • Mewajibkan PD untuk mengentry paket pekerjaan pada aplikasi SIRUP maksimal bulan Februari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP • Rutin dilaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan APBD per triwulan serta Tim TEPRRA rutin melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan untuk menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya • Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya • Menunjuk tenaga ahli untuk melakukan pendampingan pada PD saat review / kaji ulang dokumen pengajuan tender • Dilaksanakan bimtek katalog lokal kepada penyedia/UMK dan Koperasi se Kota Blitar • Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses	• Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		input produk pada Katalog Elektronik Mengikutsertakan personel PPBJ dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP	
4.	Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Untuk mengatasi permasalahan kurang maksimalnya internalisasi mandiri pada seluruh OPD terkait penerapan RB dan belum adanya <i>reward and punishmet</i> terhadap penerapan RB, terlebih dengan adanya mekanisme penerapan RB yang berbeda mulai tahun 2023 (RB general dan RB Tematik), maka pada tahun 2024 perlu adanya keberlanjutan pendampingan secara intens terhadap PD pengampu RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam pelaksanaan RB. Selain itu perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran “Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan: - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	- Diusulkan standart anggaran penyusunan SKM sehingga tidak menimbulkan perbedaan pembiayaan - Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM tahun 2024 - Berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 dalam membuat laporan SKM masing-masing perangkat daerah - Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan: - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

No.	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5. Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah 6. Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun 7. Memaksimalkan fungsi riset, inovasi daerah yang ada di Bappeda 8. Standart sarana prasarana pendukung layanan dimasukkan dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sehingga seluruh OPD menganggarkan untuk perbaikan layanan	

Sumber : LKj IP Sekretariat Daerah Kota Blitar 2022, diolah

Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung tercapainya tema pembangunan 2024, menyusun rencana kerja tahun 2024 dan menguraikan dalam 4 (empat) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 39.456.411.835,00 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari APBD Kota Blitar.

Adapun secara garis besar uraian mengenai rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 yang diturunkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, penyebaran lokasi, sumber dan kebutuhan dana/pagu indikatif serta proyeksi tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				132.518.619	APBD			132.518.619
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				132.518.619	APBD			132.518.619
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Kota Blitar	71.43 %	120.646.500	APBD		85.71 %	132.518.619
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Kota Blitar	19 kelurahan	120.646.500	APBD		20 kelurahan	132.518.619
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Dokumen	120.646.500	APBD		21 Dokumen	132.518.619
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.399.909.758	APBD			2.874.664.041
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.399.909.758	APBD			2.874.664.041

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Kota Blitar	100 %	2.399.909.758	APBD		100 %	2.874.664.041
						Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Kota Blitar	100 %	2.399.909.758	APBD		100 %	2.874.664.041
						Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi		100 %				100 %	
						Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi		100 %				100 %	
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan		100 %				100 %	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	252.794.200	APBD		10 Dokumen	284.781.762

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	1.915.110.558	APBD		5 Dokumen	2.315.681.089
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	154.693.500	APBD		4 Dokumen	169.064.091
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.33 %	3.077.311.500	APBD		83.33 %	105.137.099
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	3.077.311.500	APBD		8 Dokumen	105.137.099
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				660.140.200	APBD			877.982.572
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				660.140.200	APBD			877.982.572
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Kota Blitar	100 %	660.140.200	APBD		100%	877.982.572
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Kota Blitar	100 %	660.140.200	APBD		100%	877.982.572

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320 Dokumen	207.338.900	APBD		320 Dokumen	313.480.890
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kasus	271.810.700	APBD		4 Kasus	366.031.912
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Dokumen	180.990.600	APBD		70 Dokumen	198.469.770
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				9.636.034.562	APBD			11.065.520.744
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				9.636.034.562	APBD			11.065.520.744
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	100 %	8.781.778.500	APBD		100 %	10.048.755.644
						Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan	Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	8.781.778.500	APBD		6 Rumusan Kebijakan	10.048.755.644

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti							
						Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		4 Rumusan Kebijakan				4 Rumusan Kebijakan	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	8.563.539.500	APBD		25 Dokumen	9.761.768.437

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	114.023.300	APBD		2 Dokumen	148.819.374
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	104.215.700	APBD		2 Dokumen	138.167.833

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	100 %	854.256.062	APBD		100 %	1.016.765.100
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	651.438.400	APBD		6 Rumusan Kebijakan	811.765.100
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	234.376.000	APBD		2 Dokumen	293.760.010
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	220.108.200	APBD		2 Laporan	234.853.784
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	196.954.200	APBD		4 Dokumen	205.000.000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	2 dokumen	202.817.662	APBD		2 dokumen	205.000.000
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	202.817.662	APBD		2 Dokumen	205.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				25.120.412.842	APBD			25.644.184.437
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				25.120.412.842	APBD			25.644.184.437
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Kota Blitar	100 %	25.120.412.842	APBD		100 %	25.644.184.437
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Sangat Baik (88,32) Nilai				Sangat Baik (89) Nilai	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	11.158.300	APBD		100 %	12.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	11.158.300	APBD	Perubahan Sub Kegiatan sesuai hasil reviu APIP dan Tim Asistensi RKA 2023	1 Laporan	12.000.000
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	12.390.692.028	APBD		100 %	11.037.126.467
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Orang/ bulan	12.381.347.028	APBD		84 Orang/ bulan	11.027.126.467
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	9.345.000	APBD		4 Laporan	10.000.000
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Kota Blitar	100 %	9.450.000	APBD		100 %	13.755.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	5.210.000	APBD		2 Dokumen	7.395.000
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	4.240.000	APBD		2 Laporan	6.360.000
4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Kota Blitar	100 %	1.060.000	APBD		100 %	1.590.000
4	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.060.000	APBD		1 Dokumen	1.590.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	1.344.497.800	APBD		100 %	1.803.419.283
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	73.986.100	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	1 Paket	80.847.374
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	151.706.500	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	7 Paket	210.644.428

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	40.479.500	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	3 Paket	39.642.271
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170 Paket	552.096.400	APBD	Target diubah sesuai jumlah aktivitas	170 Paket	747.329.000
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	74.642.300	APBD	Target diubah sesuai jumlah rekening	2 Paket	83.508.210
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	43.650.000	APBD	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan selama setahun	24 Dokumen	64.800.000
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 Laporan	407.937.000	APBD	Target sesuai dengan jumlah aktivitas	130 Laporan	576.648.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar	100 %	69.410.200	APBD	Perubahan anggaran menyesuaikan dengan priotitas kebutuhan	100 %	99.224.148
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	APBD		1 Unit	25.655.002
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	69.410.200	APBD		1 Unit	73.569.146
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	4.187.398.000	APBD		100 %	4.209.258.600
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	437.000	APBD		1 Laporan	626.000
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Laporan	1.029.257.000	APBD	Target menyesuaikan jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan dikalikan jumlah bulan	48 Laporan	1.029.928.600

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											selama setahun		
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	30.600.000	APBD		6 Laporan	30.000.000
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	3.127.104.000	APBD	Target sesuai dengan jumlah laporan penyediaan jasa perbulan dikali 13 bulan	13 Laporan	3.148.704.000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100 %	1.456.487.100	APBD		100 %	1.683.210.800
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	455.630.100	APBD		2 Unit	350.000.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Unit	503.228.000	APBD		65 Unit	310.697.000
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118 Unit	237.929.000	APBD	Penambahan Sub Kegiatan sesuai arahan dari Tim Asistensi RKA dan kebutuhan yang wajib ada	40 Unit	297.393.800
4	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	APBD	Penambahan Sub Kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan	1 Unit	30.000.000
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	259.700.000	APBD		4 Unit	422.160.000
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	0	APBD		10 Unit	272.960.000

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar	100 %	923.716.314	APBD		100 %	923.759.114
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/ Bulan	178.952.314	APBD		2 Orang/ Bulan	178.952.314
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 Paket	138.764.000	APBD		23 Paket	138.806.800
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	6.000.000	APBD		2 Orang	6.000.000
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang/ Bulan	600.000.000	APBD		2 Orang/ Bulan	600.000.000
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Kota Blitar	100 %	3.087.322.900	APBD		100 %	3.518.545.433

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.456.623.800	APBD		4 Paket	2.116.975.767
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	1.334.617.200	APBD		4 Paket	1.101.569.666
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	296.081.900	APBD		12 Paket	300.000.000
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Kota Blitar	80 %	1.639.220.200	APBD		80 %	2.342.295.592
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 Laporan	1.421.862.900	APBD		33 Laporan	2.009.430.359
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Laporan	63.384.000	APBD		400 Laporan	137.852.000
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3055 Laporan	153.973.300	APBD		3055 Laporan	195.013.233

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	Sangat Baik (88,32) Nilai	880.298.873	APBD		Sangat Baik (89) Nilai	1.209.198.130
						Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik		34,48 %				41,38 %	
						Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi		75,86 %				86,21 %	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	35.503.000	APBD		100 %	77.750.252
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	16.942.500	APBD		10 Dokumen	27.754.140
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	18.560.500	APBD		6 Laporan	49.996.112

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Kota Blitar	100 %	151.494.600	APBD		100 %	188.495.500
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	69.182.000	APBD	Target menyesuaik an dengan kebutuhan	6 Paket	106.175.500
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Orang	82.312.600	APBD	Anggaran menyesuaia kan dengan kebutuhan	84 Orang	82.320.000
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar	24 OPD	693.301.273	APBD		26 OPD	942.952.378
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	182.005.100	APBD		6 Dokumen	240.338.854
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	248.560.940	APBD		5 Laporan	356.128.628
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	232.479.900	APBD		3 Dokumen	304.145.574

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	18.555.000	APBD		3 Dokumen	26.506.492
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	11.700.333	APBD		2 Dokumen	15.832.830
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	Kota Blitar	63,33 %	638.969.100	APBD		76,67 %	783.629.485
						Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Blitar	10 bahan kebijakan	159.849.100	APBD		10 bahan kebijakan	202.608.757
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	36.413.400	APBD		6 dokumen	63.774.629
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Laporan	123.435.700	APBD		16 Laporan	138.834.128

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Kota Blitar	6 nilai	479.120.000	APBD		7 nilai	581.020.728
						SKM Layanan UKPBJ		82,5 nilai				83,00 nilai	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Dokumen	275.471.400	APBD		80 Dokumen	351.163.183
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	59.892.000	APBD		2 Dokumen	61.760.160
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	143.756.600	APBD		300 Orang	168.097.385

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2023

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dimana didalamnya juga sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai sifat yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, kegiatan dalam satu instansi dan kegiatan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang memuat rencana kerja Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun. Upaya optimalisasi kinerja di Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus dapat mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 mengikuti kaidah evaluasi yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas peningkatan kualitas penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin berkembang dan guna menjawab

tantangan pengguna layanan dan stakeholder terkait, Sekretariat Daerah Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat maka perlu peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kesejahteraan masyarakat, kebijakan pemerintahan, penguatan pelaksanaan otonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat
2. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan yang baik maka perlu dilakukan:
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Peta Kebijakan Daerah
 - b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan
 - d. Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD
 - e. Melaksanakan deregulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
 - f. Memenuhi Standar JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
 - g. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan
 - h. Peningkatan belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil/Usaha Kecil dan Koperasi melalui pengadaan barang/jasa Pemerintah
3. Dalam meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu adanya penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam implementasi manajemen kinerja, Reformasi Birokrasi baik Tematik maupun General, penataan kelembagaan serta memberikan saran masukan terhadap revisi PP 18/2016, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi, penguatan SPBE, memberikan pertimbangan terkait peningkatan kesejahteraan ASN, serta penguatan pembinaan OPD penyelenggara pelayanan publik sehingga mampu menumbuhkan iklim inovasi ditingkat perangkat daerah
4. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum pelayanan publik maka perlu dilakukan:
 - a. Perlu dilakukan pembinaan/sosialisasi serta pendampingan penerapan layanan kearsipan dinamis menggunakan aplikasi nasional (SRIKANDI) pada seluruh pejabat dan ASN Sekretariat Daerah
 - b. Perlu adanya perbaikan manajemen penataan parkir di lingkungan kantor Walikota Blitar
 - c. Perlu adanya kebijakan penataan kepegawaian terutama pemenuhan kebutuhan serta pelatihan, pembinaan serta pendampingan tenaga pramuka acara pada masing-masing Perangkat Daerah
5. Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2024 ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta diperlukan komitmen, dedikasi dan kerja keras dari sumber daya di masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya

diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.